

Judul : Pabrik Sepatu Hengkang Beda UMR Mestinya Tidak Terlalu Lebar
Tanggal : Selasa, 04 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Pabrik Sepatu Hengkang Beda UMR Mestinya Tidak Terlalu Lebar

FOTO TEDYAN



Yahya Zaini

SENAYAN menyoroti sejumlah pabrik sepatu internasional meninggalkan kawasan Tangerang, Banten. Mereka berpindah ke wilayah lain dengan upah pekerja yang lebih rendah.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini mengatakan, perpindahan perusahaan besar ke daerah dengan upah minimum regional (UMR) lebih rendah sudah menjadi tren akhir-akhir ini. Daerah Jawa Tengah (Jateng) selalu menjadi lokasi yang diincar perusahaan besar karena UMR biasanya lebih rendah dibanding Jawa Barat (Jabar) dan Jawa Timur (Jatim).

"Ini hal yang wajar karena perusahaan tentunya ingin mencari keuntungan dengan melakukan efisiensi," ujar Yahya dalam keterangannya, Minggu (2/11/2025).

Diketahui, sejumlah pabrik alas kaki internasional seperti Adidas dan Nike meninggalkan kawasan Kabupaten Tangerang, Banten. Mereka berpindah ke wilayah dengan upah pekerja yang lebih rendah seperti Cirebon, Batang, dan Pekalongan.

Agar tidak terjadi perpindahan perusahaan secara besar-besaran, Yahya meminta Pemerintah menyeimbangkan UMR agar selisihnya tidak terlalu senjang atau lebar antara daerah satu dengan yang lain. "Hal ini akan sangat menguntungkan

bagi pekerja supaya tidak ada kesenjangan pendapatan," saran politikus Golkar ini.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh menambahkan, jika alasan utama perpindahan tersebut semata-mata untuk menekan biaya atau upah tenaga kerja serendah mungkin, maka hal itu sama saja dengan bentuk eksploitasi terhadap buruh. Pemerintah tidak boleh membiarkan perusahaan besar menganggap buruh hanya sebagai angka dalam neraca biaya. "Itu sudah masuk kategori eksploitasi, bukan efisiensi," tegasnya.

Pemerintah, baik pusat maupun daerah, kata Ninik harus lebih selektif dalam memberikan izin pendirian atau relokasi industri. Termasuk tidak mudah terbuai dengan janji investasi besar jika pada akhirnya kesejahteraan pekerja justru terabaikan.

Dia mengingatkan, izin pendirian perusahaan jangan hanya dilihat dari nominal investasi atau jumlah tenaga kerja yang diserap. Yang lebih penting, harus ditelusuri juga bagaimana komitmen perusahaan terhadap upah layak, jaminan sosial, dan kondisi kerja yang manusiawi.

Menurutnya, besaran upah ideal juga harus memperhitungkan omzet dan tingkat keuntungan perusahaan. Utamanya bagi korporasi besar atau produsen bermerk internasional. "Sistem pengupahan di Indonesia tidak seharusnya hanya berpatokan pada besaran UMR daerah," tandas politikus PKB ini.

UMR memang acuan minimum, tapi bukan satu-satunya patokan. Karenanya perusahaan besar dengan omzet miliaran rupiah semestinya mampu memberi upah lebih baik. "Jangan berlindung di balik UMR untuk menekan kesejahteraan buruh," ucapnya. ■ TIF